

**EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA APLIKASI
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT-GENERATION (SIKS-
NG) DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL
(Studi pada Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso)**

Therezza Deerllen Putri Maharani Sujianto¹, Afifuddin², Langgeng Rachmatullah Putra³
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*
Email: rezzaputri831@gmail.com

ABSTRAK

SIKS-NG merupakan sebuah platform berbasis digital yang dirancang untuk membantu pengelolaan program bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) di wilayah Desa Tawangargo. Platform ini memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengaturan database serta mempermudah warga dalam mengakses informasi terkait bantuan yang mereka terima. Meski demikian, implementasi aplikasi ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti kestabilan server yang belum optimal, minimnya pelatihan bagi petugas pengelola, serta adanya disparitas kemampuan digital di kalangan masyarakat lintas usia. Studi ini menerapkan kerangka teori dari George C. Edwards III sebagai alat analisis untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam penerapan suatu kebijakan. Teori tersebut menggunakan empat aspek kunci sebagai tolok ukur, yaitu: pola komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan tata kelola organisasi birokrasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif diterapkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengevaluasi efektivitas implementasi PKH melalui sistem SIKS-NG dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo mencapai kategori cukup berhasil. Program meningkatkan efisiensi pelayanan melalui komunikasi digital yang lancar, infrastruktur memadai, sikap petugas positif, dan struktur organisasi jelas. Namun menghadapi tantangan ketidakstabilan server, kurangnya pelatihan operator, kesenjangan digital generasi, dan koordinasi lintas sektor yang kompleks. Kesimpulannya, implementasi PKH melalui SIKS-NG memvalidasi teori Edwards III bahwa keempat faktor harus bekerja sinergis. Program memberikan kemudahan akses bantuan melalui digitalisasi namun memerlukan perbaikan stabilitas sistem, pelatihan operator, dan pendekatan inklusif. Keberhasilan implementasi kebijakan digital desa bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan adaptasi semua pihak.

Kata Kunci: SIKS-NG, PKH, Digitalisasi, Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Kebijakan publik yang berlaku di Indonesia lahir melalui tahapan pengambilan keputusan yang kompleks dengan keterlibatan beragam pemangku kepentingan, mencakup unsur pemerintahan, elemen masyarakat sipil, hingga pelaku usaha swasta. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul di bidang kemasyarakatan, perekonomian, dan ketatanegaraan. Mengingat Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang sangat heterogen, maka kebijakan publik yang dirumuskan harus responsif terhadap keragaman kepentingan dan harapan warga negara, sekaligus sensitif terhadap kekhasan situasi dan kondisi di masing-masing daerah (Nugroho, 2014).

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), menjadi inisiatif penting dalam upaya meningkatkan presisi dan keterpaduan basis data warga penerima program bantuan sosial. Aplikasi SIKS-NG dikembangkan dengan tujuan untuk melakukan pengisian dan pemutakhiran informasi terkait data kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan, dengan penekanan pada aspek ketelitian dan validitas data (Aptika Ogan Ilir, 2024). Penerapan sistem SIKS-NG di wilayah Desa Tawangargo diinisiasi sejak tahun 2019, dimana desa tersebut menjadi salah satu lokasi uji coba implementasi SIKS-NG berbasis desa dalam lingkup Kabupaten Malang.

Meski demikian, penerapan SIKS-NG dalam praktiknya menghadapi sejumlah hambatan dan belum berjalan secara optimal. Studi yang dilaksanakan oleh Prasetyo dan Rohman (2020) mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi SIKS-NG, di antaranya meliputi terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi di wilayah perdesaan, minimnya kompetensi pengelola sistem dalam mengoperasikan aplikasi, serta masih rendahnya keterlibatan aktif warga dalam kegiatan pembaruan data. Apabila implementasi

SIKS-NG dapat dilaksanakan secara maksimal dan mampu meningkatkan ketepatan data penerima program bantuan sosial, hal ini berpotensi memberikan dampak positif yang besar terhadap tingkat keberhasilan dan efisiensi program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (Siks-Ng) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (Siks-Ng) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial?

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji tingkat keefektifan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melalui penggunaan platform Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
2. Menelaah berbagai elemen yang menjadi pendorong maupun penghalang terhadap keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dioperasikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam mekanisme distribusi bantuan sosial.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan yang berkontribusi memperkaya khazanah kepustakaan ilmiah di bidang kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan program transformasi digital melalui platform SIKS-NG.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Terkait
Peneliti ini dapat Menyediakan evaluasi komprehensif tentang efektivitas implementasi SIKS-NG di tingkat desa
 - b. Bagi Masyarakat
Bagi penulis dapat menambahkan pengetahuan kesadaran dan pemahaman tentang contoh aplikasi teori implementasi kebijakan dalam konteks nyata

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), proses pelaksanaan kebijakan memegang peranan vital karena betapapun berkualitasnya suatu kebijakan, tanpa persiapan dan perencanaan implementasi yang matang, tujuan dari kebijakan publik tersebut tidak akan tercapai. Dalam pandangan George C. Edwards III (dikutip dalam Subarsono, 2011), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor kunci. **Faktor pertama adalah komunikasi**, yang mengisyaratkan bahwa pelaksana kebijakan perlu memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka. Tujuan serta target kebijakan harus disampaikan secara efektif kepada kelompok sasaran guna meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan. Efektivitas komunikasi dapat diukur melalui tiga aspek: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi yang berkualitas akan menghasilkan implementasi yang optimal. Kejelasan menekankan bahwa informasi yang diterima pelaksana harus mudah dipahami tanpa menimbulkan kebingungan. Konsistensi menuntut bahwa arahan pelaksanaan kebijakan harus tegas dan tidak berubah-ubah dalam penerapannya. **Faktor kedua adalah sumber daya**, dimana meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik dan konsisten, namun tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan optimal. Sumber daya mencakup kapasitas sumber daya manusia seperti kompetensi pelaksana, serta dukungan anggaran. Implementasi kebijakan memerlukan beberapa komponen sumber daya meliputi tenaga kerja, akses informasi, kewenangan, dan sarana prasarana. **Faktor ketiga adalah disposisi**, yaitu sikap dan karakter yang dimiliki pelaksana kebijakan, seperti dedikasi, integritas, dan nilai-nilai demokratis.

Pelaksana dengan disposisi positif akan mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan para perumus kebijakan. **Faktor keempat adalah struktur birokrasi**. Struktur kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan memberikan dampak besar terhadap efektivitas implementasi. Elemen penting dari struktur organisasi meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang memiliki hierarki terlalu panjang cenderung memperlemah fungsi kontrol dan menciptakan birokrasi berbelit-belit yang menghambat efisiensi.

Program Keluarga Harapan

PKH adalah program bantuan sosial berkondisi dari Kementerian Sosial RI yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi syarat tertentu. Sejak diluncurkan tahun 2007, PKH menjadi program andalan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM keluarga miskin (Kementerian Sosial RI, 2019). Program ini

mengadopsi konsep Conditional Cash Transfers (CCT) yang telah sukses diterapkan di berbagai negara. PKH menysasar keluarga miskin dan rentan yang terdaftar di DTKS dengan kriteria meliputi aspek kesehatan (ibu hamil, balita, anak pra-sekolah), pendidikan (jenjang SD hingga SMA), dan kesejahteraan sosial (lansia minimal 60 tahun serta penyandang disabilitas berat) (TNP2K, 2021). Dalam pelaksanaannya, PKH memiliki tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pada komponen kesehatan, keluarga penerima manfaat diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Pada komponen pendidikan, keluarga diwajibkan memastikan anak usia sekolah terdaftar di sekolah dengan kehadiran minimal 85%. Komponen kesejahteraan sosial memberikan perhatian khusus pada lansia dan penyandang disabilitas berat.

SIKS-NG

SIKS-NG merupakan platform digital dari Kementerian Sosial RI yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan integrasi data penerima bantuan sosial sebagai pengganti sistem lama yang kurang efektif. Sistem ini diharapkan mempercepat dan memperbaiki proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan (Kementerian Sosial RI, 2022).Keunggulan SIKS-NG mencakup verifikasi data real-time, integrasi data antar-instansi pemerintah, dan pemutakhiran data yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi masyarakat. Implementasinya dimulai bertahap sejak 2018 untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial nasional.Namun, Prasetyo dan Rohman (2020) mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi seperti keterbatasan infrastruktur TI di desa, minimnya kompetensi operator, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data—faktor-faktor yang dapat menghambat tujuan utama SIKS-NG dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode kualitatif adalah pendekatan riset yang mendalam untuk memahami fenomena sosial melalui eksplorasi pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Menurut Creswell (2014), metode ini memungkinkan peneliti menggali makna yang individu berikan pada suatu persoalan sosial. Adapun pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan fakta dan karakteristik fenomena secara sistematis dan akurat.Sugiyono (2019) menyatakan penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan objek penelitian apa adanya, tanpa bermaksud membuat generalisasi. Metode ini menghasilkan data naratif dan mendalam tentang kompleksitas fenomena sosial.

Fokus Penelitian

Creswell (2014) menekankan bahwa fokus penelitian perlu dirumuskan secara tegas dan terperinci agar peneliti mampu mengenali variabel-variabel yang akan dikaji beserta keterkaitan antar variabel tersebut. Kejelasan fokus ini menjadi krusial untuk menjamin bahwa riset dapat memberikan sumbangsih bermakna terhadap pemahaman suatu fenomena. Lebih lanjut, penetapan fokus yang akurat juga memfasilitasi peneliti dalam menyusun pertanyaan riset yang substansial dan berbobot, yang selanjutnya akan menjadi panduan dalam tahapan pengumpulan serta analisis data.Fokus penelitian yang jelas memungkinkan peneliti untuk mengarahkan perhatian pada aspek-aspek penting dari fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih terarah, mendalam, dan bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Keefektifan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui platform Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial di wilayah Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso. Mengacu pada konsep George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yakni: pola komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan tata kelola struktur birokrasi.
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui platform Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial di wilayah Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso.
 - a) Faktor Pendukung
 - 1) Komunikasi yang baik antar instansi
 - 2) Kemudahan akses bantuan untuk masyarakat
 - 3) Kualitas dan keakuratan data yang baik
 - 4) Fasilitas pendukung yang memadai
 - 5) Kompetensi perangkat dasa yang memadai
 - b) Faktor penghambat
 - 1) Masalah teknis system
 - 2) Kurangnya pelatihan operator
 - 3) Ketidakakuratan data di system
 - 4) Kurangnya sosialisasi update system

- 5) Keterbatasan teknologi Masyarakat
- 6) Proses input data yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area atau kawasan dimana kegiatan riset akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan dan fokus kajian yang ditetapkan. Hamid Darmadi (2011:52) menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya proses studi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dikaji selama riset berlangsung. Studi mengenai keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui platform Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dilaksanakan di wilayah Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh dukungan dari aparat desa dan warga lokal yang sangat responsif serta memberikan kemudahan dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan narasumber penelitian serta melalui kegiatan observasi atau pengamatan lapangan secara langsung.

2. Data sekunder

Sugiyono mendefinisikan data sekunder sebagai sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, misalnya melalui pihak ketiga atau melalui dokumen tertulis. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap yang umumnya dikumpulkan melalui kajian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti literatur, regulasi, peraturan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini berperan sebagai data tambahan yang memperkaya dan melengkapi data primer yang telah dikumpulkan.

Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menerapkan sejumlah metode pengumpulan data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek yang menjadi subjek kajian. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa observasi adalah metode yang efektif untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, sebab peneliti dapat menyaksikan secara langsung kondisi aktual di lokasi penelitian. Dalam riset ini, peneliti mengadakan observasi terhadap keefektifan PKH melalui platform SIKS-NG di wilayah Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kegiatan observasi dilakukan secara intensif selama periode 1 bulan dengan frekuensi 3 kali kunjungan, dimana setiap sesi pengamatan berlangsung antara 1-2 jam guna mendapatkan data yang komprehensif.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan adanya interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam terkait topik kajian. Moleong (2018) menyatakan bahwa wawancara merupakan metode yang sangat bermanfaat dalam riset kualitatif karena memfasilitasi peneliti untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan detail. Dalam studi ini, peneliti mengadakan wawancara dengan pengelola Aplikasi SIKS-NG, yaitu Bapak Eka Pandu Reyhnata, yang telah mengoperasikan aplikasi SIKS-NG sejak tahun 2021 hingga saat ini. Peneliti merancang pedoman wawancara sebagai acuan alur dan substansi wawancara guna memastikan konsistensi tujuan yang diperlukan dalam mengkaji efektivitas PKH melalui platform SIKS-NG.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencakup pengumpulan dan penganalisisan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan sumber informasi yang krusial dalam riset karena dapat menyediakan bukti faktual yang menguatkan analisis dan simpulan yang dihasilkan. Dalam studi ini, dokumentasi meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber seperti laporan resmi Kementerian Sosial, data kependudukan dari Kantor Desa Tawangargo, serta dokumen yang berkaitan dengan penerapan SIKS-NG. Kegiatan dokumentasi yang dilaksanakan peneliti berupa pengambilan foto tampilan aplikasi SIKS-NG, foto kegiatan wawancara dengan pengelola Aplikasi SIKS-NG, dan bagan struktur organisasi Desa Tawangargo sebagai pendukung kelengkapan data penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan komponen vital dalam metodologi penelitian ilmiah karena melalui analisis data dapat diberikan interpretasi dan pemaknaan yang bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.

Moleong (2016) menjelaskan bahwa riset kualitatif menitikberatkan pada elaborasi naratif sehingga dapat memahami kompleksitas kondisi psikologis manusia. Tujuan dari analisis data kualitatif adalah memungkinkan peneliti menemukan makna dari variabel-variabel sebagai solusi atas permasalahan yang dirumuskan. Teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) meliputi tiga tahapan pokok yang saling berkaitan, yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang berlangsung secara berkesinambungan sepanjang proses penelitian.

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dari semua sumber, baik data primer maupun sekunder. Menurut Sugiyono (2017:239), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara terus menerus hingga menjawab permasalahan tentang efektivitas PKH melalui aplikasi SIKS-NG.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan tahapan seleksi informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi di lokasi penelitian, yang selanjutnya diarahkan pada penerapan Aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan ketepatan data penerima PKH di Desa Tawangargo. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), kondensasi data mencakup empat tahapan: pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian, dan penyederhanaan. Proses pemilihan dilakukan dengan memberikan kode pada setiap item hasil wawancara. Pemfokusan memusatkan perhatian pada permasalahan yang dirumuskan dengan mengacu pada empat indikator teori Edward III. Pengabstraksian merangkum hal-hal penting dan informasi utama. Penyederhanaan mentransformasikan data menjadi bentuk lebih sederhana melalui pengelompokan sistematis.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam format deskripsi ringkas, diagram, relasi antar kategori, dan bagan alur. Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, metode penyajian data yang paling umum digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam studi ini, data dipaparkan melalui teks naratif dengan analisis komprehensif mengenai temuan penelitian. Penyajian data mengolah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dihimpun peneliti dari Kantor Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, kemudian menyusunnya menjadi pola yang mampu menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

4) Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verification Conclusion*)

Tahapan akhir dalam kerangka analisis Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dalam riset kualitatif merupakan temuan inovatif yang sebelumnya belum terungkap. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau penggambaran suatu objek yang awalnya masih samar menjadi lebih jelas setelah diteliti, dapat pula berbentuk hubungan sebab-akibat, pola interaktif, hipotesis, maupun teori. Peneliti yang telah mengumpulkan data akan berupaya merumuskan kesimpulan, kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi sepanjang proses penelitian untuk memastikan validitasnya dengan menggali data baru yang lebih komprehensif.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam riset kualitatif merupakan kriteria fundamental terhadap hasil data penelitian, yaitu valid, reliabel, dan objektif. Data yang valid adalah informasi yang konsisten antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan kondisi faktual yang terdapat di lokasi penelitian. Pengujian keabsahan data yang dilaksanakan peneliti terhadap Implementasi Aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan akurasi data penerima PKH Desa Tawangargo perlu dilakukan melalui prosedur penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. William Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2023:189) menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan pada berbagai waktu, yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber sebagai metode pengujian kredibilitas data dilaksanakan dengan melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan melalui beberapa sumber yang berbeda. Sugiyono (2013:274) mencontohkan, seperti membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan temuan wawancara dengan dokumen yang tersedia, serta membandingkan hasil wawancara dari satu informan dengan informan lainnya. Dalam studi ini, triangulasi sumber diimplementasikan dengan menguji keabsahan data melalui penelusuran komprehensif terhadap informasi dari hasil wawancara lintas informan yang kemudian dibandingkan dengan dokumen pendukung yang relevan hingga ditemukan tingkat kredibilitasnya untuk dirumuskan menjadi kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Sugiyono (2015:274) menjelaskan bahwa triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap sumber yang sama menggunakan metode yang

berbeda. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila ketiga teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang tidak konsisten, maka peneliti mengadakan diskusi dengan narasumber terkait untuk memastikan data mana yang akurat. Dalam studi ini, peneliti melakukan verifikasi data dengan mengadakan diskusi komprehensif terhadap temuan dari tiga metode berbeda, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan berbagai sumber, cara, dan waktu. Menurut Sugiyono (2015:274), perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan enam kali secara tatap muka dan terus menerus melalui WhatsApp, serta melakukan observasi sebanyak enam kali.

Hasil dan Pembahasan

1. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial

Digitalisasi sistem bantuan sosial menjadi kebutuhan penting saat ini untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat. SIKS-NG hadir mengatasi masalah sistem lama seperti antrean panjang, proses rumit, data tidak akurat, dan kurangnya transparansi. Kantor Desa Tawangargo mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pelayanan PKH. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III dengan empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis efektivitas SIKS-NG.

a) Komunikasi

Raahmatillah (2023) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu elemen vital dalam pelaksanaan kebijakan, karena komunikasi yang efektif memfasilitasi interaksi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III, efektivitas komunikasi memainkan peranan krusial dalam menentukan kesuksesan suatu program. Pada proses implementasi program PKH melalui platform SIKS-NG di Desa Tawangargo, komunikasi memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa program bantuan sosial dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara optimal oleh semua pihak yang berkepentingan. Kantor Desa Tawangargo sebagai implementor utama program memiliki tanggung jawab sentral dalam menyampaikan informasi teknis berkaitan dengan pelaksanaan program PKH melalui sistem digital.

Komunikasi dalam implementasi SIKS-NG dapat dianalisis melalui tiga indikator: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi informasi menunjukkan hasil beragam dengan jalur komunikasi yang baik melalui grup WhatsApp, namun menghadapi tantangan karena tidak adanya pelatihan formal bagi operator. Kejelasan implementasi menunjukkan paradoks dimana aplikasi mudah digunakan tetapi tidak ada SOP yang tersosialisasi dengan baik. Konsistensi pelaksanaan terlihat baik dalam pengelolaan data namun masih ada masalah ketepatan sasaran dengan tingkat kesalahan mencapai 30 persen.

b) Sumberdaya

Dalam pandangan Edwards III, sumber daya merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi kapasitas sumber daya manusia, pendanaan, infrastruktur fasilitas, dan akses informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan suatu program. Robbins & Judge (2017) menekankan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi syarat utama bagi organisasi untuk meraih target yang telah ditentukan.

Pada proses pelaksanaan program PKH melalui platform SIKS-NG di Desa Tawangargo, sumber daya memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa program bantuan sosial dapat beroperasi secara efektif dan menghasilkan dampak maksimal bagi masyarakat penerima manfaat. Kantor Desa Tawangargo selaku implementor primer program harus menjamin ketersediaan berbagai jenis sumber daya, seperti tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam mengelola sistem digital, infrastruktur teknologi informasi yang mencukupi, alokasi anggaran operasional untuk perawatan sistem dan pelatihan pengelola, serta akses informasi yang diperlukan untuk administrasi data penerima bantuan PKH.

Sumber daya dalam implementasi SIKS-NG dapat dianalisis melalui empat indikator: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dari segi staf, kemampuan teknis petugas sudah memenuhi syarat dasar namun menghadapi masalah jumlah petugas yang terbatas sehingga operator sering kewalahan. Dari segi informasi, sistem sudah menyediakan data yang lengkap dan terintegrasi namun menghadapi masalah keakuratan dengan kesenjangan 30 persen antara data sistem dengan kondisi lapangan. Dari segi wewenang, ditemukan masalah penghapusan insentif yang sebelumnya ada sehingga dapat mempengaruhi motivasi dan komitmen operator dalam jangka panjang. Dari segi fasilitas, infrastruktur dasar seperti komputer dan internet sudah memadai namun sistem

aplikasi SIKS-NG sering mengalami error server yang menghambat operasional dan tidak dapat dikontrol oleh operator lokal.

c) Disposisi

Menurut Edwards III, sikap atau disposisi adalah hal penting dalam menjalankan sebuah program yang menunjukkan bagaimana perasaan dan dukungan orang-orang yang menjalankan program terhadap program tersebut. Van Meter dan Van Horn (2019) mengatakan bahwa sikap positif dari orang-orang yang menjalankan program akan membuat program berhasil, sedangkan sikap negatif dapat menghambat tercapainya tujuan program.

Dalam penerapan program PKH melalui aplikasi SIKS-NG di Desa Tawangargo, sikap dari para petugas yang menjalankan program sangat penting untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sikap dan komitmen dari operator sistem, pendamping PKH, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan sangat menentukan efektivitas penggunaan sistem digital dalam proses pembagian bantuan.

Disposisi dalam implementasi SIKS-NG dapat dianalisis melalui dua indikator: pengangkatan birokrasi dan insentif. Dari segi pengangkatan birokrasi, petugas menunjukkan sikap positif terhadap tujuan program namun frustrasi dengan sistem yang rumit. Penerima bantuan generasi muda menunjukkan sikap sangat positif, sementara generasi tua cenderung cemas terhadap teknologi. Dari segi insentif yang diukur melalui pemahaman, generasi muda memiliki pemahaman sangat baik, sedangkan operator menghadapi keterbatasan pemahaman karena tidak ada pelatihan formal.

d) Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III, struktur birokrasi merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan yang mencakup aspek organisasi, pembagian tugas, koordinasi, dan standar operasional prosedur yang mengatur jalannya program. Robbins & Coulter (2018) menegaskan bahwa struktur organisasi yang jelas dan efektif akan memudahkan koordinasi dan komunikasi antar unit dalam mencapai tujuan bersama.

Pada proses pelaksanaan program PKH menggunakan platform SIKS-NG di Desa Tawangargo, struktur birokrasi memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin bahwa program bantuan sosial dapat dioperasikan secara sistematis, terkoordinasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Struktur yang melibatkan berbagai jenjang mulai dari dinas sosial di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa harus mampu beroperasi secara sinergis dan terkoordinasi.

Struktur birokrasi dalam implementasi SIKS-NG dapat dianalisis melalui dua indikator: SOP dan fragmentasi. Dari segi SOP, secara formal sudah tersedia di tingkat regulasi namun mengalami kesenjangan dalam sosialisasi kepada operator yang harus belajar otodidak tanpa pelatihan formal. Pertemuan evaluasi bulanan yang dulunya ada kini tidak dilaksanakan lagi. Dari segi fragmentasi, terdapat kejelasan pembagian tugas antara desa dan pusat, namun koordinasi lintas instansi seperti kesehatan dan pendidikan menjadi rumit dengan sistem data yang tidak selalu sinkron dan batasan waktu pengajuan yang berbeda-beda.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (Siks-Ng) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial

a) Faktor Pendukung

1) Komunikasi yang baik antar instansi

Studi ini mengidentifikasi bahwa salah satu elemen pendukung yang sangat krusial dalam mengoperasikan sistem SIKS-NG adalah terbentuknya komunikasi yang efektif antar berbagai jenjang instansi yang terlibat. Alur komunikasi dari tingkat desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke dinas sosial berlangsung dengan sangat lancar tanpa kendala yang signifikan. Ketika operator menghadapi masalah atau membutuhkan bantuan urgent, respons yang diberikan cukup cepat dan memadai. Kondisi komunikasi yang responsif ini menciptakan rasa percaya diri bagi operator di tingkat desa karena mereka tahu bahwa dukungan selalu tersedia ketika dibutuhkan, sehingga komunikasi yang baik antar instansi menjadi fondasi penting yang memungkinkan sistem SIKS-NG dapat berjalan dengan lancar.

2) Kemudahan akses bantuan untuk masyarakat

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial telah memberikan dampak positif yang besar bagi kemudahan akses masyarakat terhadap program bantuan. Dengan adanya sistem ATM yang terintegrasi, masyarakat dapat mengambil bantuan dengan mudah tanpa harus datang ke kantor desa. Digitalisasi sistem telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan program bantuan sosial secara keseluruhan, mulai dari proses pendaftaran online, cek status di aplikasi, hingga pengambilan bantuan di ATM terdekat tanpa perlu antri lama. Kemudahan ini sangat dirasakan oleh penerima bantuan dan menunjukkan bahwa sistem digital telah

berhasil menghilangkan hambatan-hambatan tradisional yang seringkali menyulitkan masyarakat dalam mengakses bantuan.

3) Kualitas dan keakuratan data yang baik

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu aspek positif yang menonjol dari penerapan sistem SIKS-NG adalah kualitas dan keakuratan data yang dihasilkan sistem. Dari perspektif operator, data yang ada dalam sistem selalu terjaga keakuratannya dan rutin diperbarui sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Keakuratan data juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan langsung masyarakat dalam proses input data secara online, dimana masyarakat yang menginput sendiri cenderung lebih teliti dan rajin mengecek serta memperbarui data ketika ada perubahan. Kombinasi antara sistem yang dapat diandalkan dengan partisipasi aktif masyarakat menciptakan kondisi ideal untuk menjaga kualitas dan keakuratan data dalam jangka panjang.

4) Fasilitas pendukung yang memadai

Keberhasilan penerapan sistem digital SIKS-NG sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Infrastruktur teknologi yang baik merupakan dasar utama agar sistem dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saat ini, kondisi fasilitas pendukung sudah mengalami perbaikan yang cukup berarti dengan komputer yang bagus dan internet yang stabil. Namun, kondisi ini adalah hasil dari proses perbaikan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 ketika sistem sering terganggu karena menggunakan komputer lama yang sangat lambat. Upaya perbaikan fasilitas menunjukkan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan keseriusan dalam mendukung penerapan sistem digital.

5) Kompetensi perangkat desa yang memadai

Kesuksesan implementasi sistem digital dalam layanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Perangkat desa yang terlibat dalam penerapan SIKS-NG telah menunjukkan tingkat kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka mampu mengoperasikan sistem dengan lancar dan memahami berbagai prosedur yang harus dilakukan melalui platform digital. Perangkat desa sudah kompeten, terutama dalam hal pengusulan, penghapusan, atau penanganan melalui aplikasi SIKS-NG. Kemampuan yang baik ini menjadi modal penting untuk keberlangsungan penerapan sistem digital dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b) Faktor penghambat

1) Masalah teknis sistem (server error)

Dalam penggunaan sehari-hari, SIKS-NG menghadapi kendala teknis yang cukup serius, terutama terkait dengan server yang sering mengalami gangguan. Meskipun kualitas data yang dihasilkan sudah baik, akurat, dan selalu update, namun kendala utama adalah server yang sering error. Ketika server mengalami gangguan, operator tidak memiliki banyak pilihan dan harus bersabar menunggu atau terus mencoba sampai sistem dapat diakses kembali. Masalah ini menjadi semakin rumit karena sistem SIKS-NG dikendalikan sepenuhnya dari pusat, sehingga ketika ada masalah atau error, operator di desa tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu pihak pusat memperbaikinya.

2) Kurangnya pelatihan untuk operator

Kurangnya pelatihan operator SIKS-NG menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem. Operator seperti Eka Pandu Reyhnata harus belajar secara otodidak dengan bertanya kepada operator desa lain karena tidak pernah mendapat pelatihan atau bimbingan teknis formal. Mereka juga tidak memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya menjadi panduan kerja. Menurut teori Edwards III, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *capacity building* dalam implementasi kebijakan. Ketidadaan pelatihan formal menciptakan risiko variasi pemahaman dan inkonsistensi pelaksanaan antar operator. Edwards III menekankan bahwa pelatihan sistematis adalah investasi penting untuk membangun kompetensi staff dan keberhasilan jangka panjang implementasi program.

3) Ketidakakuratan data di sistem

Ketidakakuratan data menjadi tantangan serius dalam SIKS-NG. Operator Eka Pandu Reyhnata mengungkapkan bahwa hanya 70 persen data benar untuk warga tidak mampu, sedangkan 30 persen masih kurang tepat. Ibu Siti Aisyah mengalami kesalahan data anak keduanya yang tidak tercatat meski masih sekolah SMP, namun berhasil diperbaiki dengan bantuan pendamping. Penerima manfaat yang juga kader menunjukkan akurasi data lebih baik karena proaktif melaporkan perubahan. Menurut teori Edwards III, ketidakakuratan 30 persen merupakan hambatan kritis dalam sumber daya informasi yang menyebabkan *mis-targeting* dan ketidakadilan distribusi bantuan. Edwards III menekankan perlunya mekanisme verifikasi proaktif dan validasi sistematis, bukan hanya pendekatan reaktif menunggu laporan kesalahan.

4) Kurangnya sosialisasi update sistem

Kurangnya sosialisasi pembaruan sistem SIKS-NG menjadi hambatan operasional. Operator Eka Pandu Reyhnata menjelaskan bahwa mereka sering tidak diberi tahu tentang pembaruan dari atasan, sehingga tiba-tiba menemukan perubahan elemen seperti menu-menu baru, dan informasi diberikan terlambat. Kondisi ini mengganggu kelancaran kerja dan berpotensi menimbulkan kesalahan operasional. Menurut teori Edwards III, keterlambatan informasi bertentangan dengan prinsip transmisi informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pelaksana kebijakan. Edwards III menekankan bahwa komunikasi efektif harus kontinyu dan mencakup pembaruan selama implementasi. Situasi operator menemukan perubahan tanpa pemberitahuan menunjukkan kegagalan komunikasi top-down. Edwards III menyarankan mekanisme komunikasi terstruktur dan proaktif agar operator dapat menyesuaikan cara kerja tanpa gangguan berarti.

5) Keterbatasan teknologi masyarakat

Keterbatasan literasi teknologi masyarakat menjadi hambatan dalam penerapan SIKS-NG. Ibu Siti Aisyah mengungkapkan sistem terasa rumit karena kurang mengerti teknologi. Masyarakat mengalami kesulitan ketika ada perubahan sistem atau masalah teknis dan harus terus bertanya kepada petugas. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil memperparah kesenjangan digital dengan akses internet tidak stabil. Penerima bantuan di pusat desa menunjukkan adaptasi lebih baik namun tetap kesulitan mengecek data mandiri. Menurut teori Edwards III, keterbatasan literasi teknologi mencerminkan hambatan dalam disposisi dan sumber daya. Edwards III menekankan kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas kelompok sasaran memerlukan strategi implementasi diferensiasi, program literasi digital intensif, dan desain sistem inklusif yang mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan teknologi.

6) Proses input data yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan

Ketidaksesuaian proses input data SIKS-NG menjadi tantangan dalam penerapan sistem. Data yang bersumber dari pusat seringkali tidak menangkap kondisi nyata masyarakat di tingkat desa. Operator Eka Pandu Reyhnata menyarankan data seharusnya dari bawah dengan melibatkan RT yang mengetahui warga mana yang benar-benar membutuhkan bantuan dan sudah mampu. Pendekatan bottom-up dapat meningkatkan ketepatan sasaran karena perangkat desa memahami kondisi sosial ekonomi warga secara mendalam. Menurut teori Edwards III, pendekatan terlalu tersentralisasi menciptakan kesenjangan antara data administratif dan kondisi faktual. Edwards III menekankan pentingnya melibatkan pelaksana lokal yang memiliki pengetahuan kontekstual untuk akurasi data. Solusi optimal adalah sistem hybrid yang menggabungkan standarisasi terpusat dengan mekanisme verifikasi lokal berbasis partisipasi masyarakat setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis pembahasan yang telah diuraikan, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo menunjukkan hasil beragam berdasarkan teori Edwards III. Aspek komunikasi sudah baik antar tingkatan pemerintahan, namun operator tidak mendapat pelatihan formal dan sering terlambat menerima informasi pembaruan sistem. Sumber daya infrastruktur memadai dengan komputer bagus dan internet stabil, tetapi server sering bermasalah, tenaga kerja terbatas, dan hanya 70% data akurat. Disposisi pelaksana positif, namun generasi tua kesulitan menggunakan teknologi dibanding generasi muda yang adaptif. Struktur birokrasi memiliki pembagian tanggung jawab jelas, tetapi operator tidak mendapat sosialisasi SOP dan koordinasi lintas instansi rumit. Secara keseluruhan, program menunjukkan kemajuan digitalisasi namun memerlukan perbaikan stabilitas sistem, pelatihan petugas, peningkatan akurasi data, dan pendekatan inklusif untuk mencapai efektivitas optimal.
2. Pelaksanaan PKH menggunakan SIKS-NG di Desa Tawangargo memiliki elemen pendorong dan penghambat. Elemen pendorong mencakup komunikasi lintas instansi yang efektif dan responsif, kemudahan akses bantuan melalui platform digital dengan registrasi online dan pencairan melalui ATM, tingkat akurasi data yang memadai karena masyarakat menginput data secara mandiri dan melakukan pemutakhiran secara berkala, serta ketersediaan fasilitas komputer dan jaringan internet yang mencukupi dengan dukungan perangkat desa yang kompeten. Faktor penghambat mencakup masalah teknis server yang sering error dan tidak bisa diperbaiki operator karena dikelola terpusat, kurangnya pelatihan formal sehingga operator belajar otodidak yang berisiko kesalahan, ketidakakuratan data mencapai 30%, kurangnya sosialisasi pembaruan sistem menyebabkan keterlambatan informasi, keterbatasan literasi teknologi generasi tua yang bergantung pada petugas, dan proses input data terpusat tidak sesuai kondisi lapangan sebenarnya.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, yaitu:

a. Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sistem Berkala

Melakukan monitoring rutin terhadap kinerja sistem SIKS-NG: kecepatan loading, frekuensi error, tingkat kesulitan operator. Membuat mekanisme feedback dari operator desa tentang kendala yang mereka hadapi. Feedback ini digunakan untuk perbaikan sistem secara berkala sehingga aplikasi semakin baik dan sesuai kebutuhan pengguna di lapangan.

b. Perbaikan dan Penguatan Infrastruktur Teknologi

Menyediakan perangkat komputer/laptop yang memadai dan koneksi internet stabil di setiap desa. Pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan dan pemeliharaan rutin perangkat IT di desa. Termasuk menyediakan genset atau backup power untuk mengantisipasi pemadaman listrik yang sering terjadi di desa, sehingga operator bisa terus bekerja meskipun listrik mati.

c. Sistem Validasi Data Berlapis dengan Pelibatan Komunitas

Merancang sistem verifikasi data secara berjenjang yang dimulai dari tingkat RT/RW, tokoh masyarakat, desa, sampai ke tingkat kecamatan. Setiap tingkatan memverifikasi kebenaran data sebelum masuk ke sistem pusat. RT/RW dan tokoh agama diminta memberi konfirmasi apakah data di sistem sesuai dengan kondisi riil keluarga. Ini efektif karena orang lokal lebih tahu kondisi sebenarnya tetangga mereka dan bisa mengidentifikasi keluarga mana yang benar-benar berhak atau tidak berhak menerima bantuan.

d. Pemutakhiran Data Berbasis Kejadian dengan Aplikasi Mobile

Membuat sistem pelaporan otomatis setiap ada perubahan kondisi keluarga seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pindah kerja, atau naik kelas ekonomi. Mengembangkan aplikasi sederhana di HP yang bisa digunakan operator atau kader desa untuk melaporkan perubahan data langsung dari lapangan tanpa harus ke kantor desa. Setiap kejadian langsung dicatat dan dimasukkan ke SIKS-NG agar data selalu terkini, bukan menunggu jadwal pemutakhiran tahunan.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Skripsi

- Andhika, L. R. (2017). "Meningkatkan Implementasi Kebijakan Melalui Model Kolaborasi". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 29-42.
- Anggara, S., Wisitaningrum, T., & Rahayu, A. Y. S. (2018). Analisis Kebijakan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 117-132.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559.
- Cahyadi, E., et al. (2020). Model Conditional Cash Transfer dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(1), 45-60.
- Dharmawan, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45-60.
- Etzioni, A. (1967). "Mixed-scanning: A 'Third' Approach to Decision-making". *Public Administration Review*, 27(5), 385-392.
- Fadillah, R., & Purnamasari, I. (2023). Penerapan Teori Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pemerintah: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-62.
- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2023). Evaluasi Penerapan SIKS-NG dalam Meningkatkan Efektivitas Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 78-92.
- Irawan, A. (2021). Implementasi SIKS-NG dalam Pengelolaan Data Penerima Bantuan Sosial di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45-60.
- Irawan, A. (2021). Keunggulan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation dalam Penyaluran Bantuan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123-135

Buku

- Afrizal. (2019). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anderson, J. E. (2010). Public Policymaking: An Introduction. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Arief, B. (2019). Administrasi Publik di Era Digital. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2016). * Panduan Praktis untuk Analisis Kebijakan: Delapan Langkah Menuju Pemecahan Masalah yang Lebih Efektif. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Bennett, C. J., & Howlett, M. (1992). * Pelajaran dari Pembelajaran: Menyatukan Teori Pembelajaran Kebijakan

- dan Perubahan Kebijakan. *Policy Sciences*, 25(3), 275-294.
- Creswell, J. W. (2014).* *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2015).* *Analisis Kebijakan Publik: Sebuah Pengantar*. New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education.
- Friedman, M. (2002).* *Peran Pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial: Perspektif Perbandingan*. New York: Routledge.
- Gordon, L. (2010).* *Politik Kesejahteraan Sosial di Amerika Serikat*. New York: Routledge.
- Halim, M. (2020). *Manajemen Pemerintahan Berbasis Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Halim. (2022). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, F. (2023). *Kombinasi Pendekatan Digital Governance: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia.
- Hidayat, T. (2020). *Digital Governance: Revolusi Teknologi dalam Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2018).* *Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Global*. London: Routledge.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, R. A. (2021). *Pendekatan Digital Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, M. (2019). *E-Government dan E-Governance: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, H. (2020). *Strategi Implementasi E-Government*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Website

- BPS. (2024, 1 Juli). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen. Siaran Pers No. 58/07/Th. XXVII. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- DRI IPB. (2019, 19 September). Guna percepatan graduasi mandiri, KPM PKH Sempur diserbu dosen IPB. Direktorat Riset dan Inovasi IPB. <https://dri.ipb.ac.id/guna-percepatan-graduasi-mandiri-kmp-pkh-sempur-diserbu-dosen-ipb/>
- Jakarta.go.id. (2024). Program Keluarga Harapan (PKH). Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari <https://www.jakarta.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Kemensos. (2024). Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>
- Repository UGM. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/166945>
- Repository UGM. (2021). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di Pulau Jawa: Analisis evaluasi dampak Propensity Score Matching (PSM) data IFLS 5. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/174333>
- SMERU Research Institute. (2019). Penguatan Peluang Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan: Studi Kasus di Empat Kabupaten di Jawa. The SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id/id/publication-id/penguatan-peluang-ekonomi-keluarga-penerima-program-keluarga-harapan-studi-kasus-di>
- Universitas Airlangga. (2025, 11 Maret). Analisis determinan kemiskinan multidimensi di Indonesia. UNAIR News. <https://unair.ac.id/analisis-determinan-kemiskinan-multidimensi-di-indonesia/>
- World Bank. (2011). Program Keluarga Harapan: Main findings from the impact evaluation of Indonesia's pilot household conditional cash transfer program. World Bank.
- Aptika Ogan Ilir. (2024). SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Aptika Kabupaten Ogan Ilir. <https://aptika.oganilirkab.go.id/aplikasi/siks-ng-sistem-informasi-kesejahteraan-sosial-next->

generation

- Desa Piyaman. (2024). Pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG online. Pemerintah Desa Piyaman, Gunungkidul. <https://desapiyaman.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1950-PENGELOLAAN-DTKS-MELALUI-APLIKASI-SIKS-NG-ONLINE>
- Kementerian PAN-RB. (2024). Inovasi SIKS-NG, sajikan data bansos terintegrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inovasi-siks-ng-sajikan-data-bansos-terintegrasi>